

Navigating Urban Vulnerable Groups: The Role of the Women's Ship Facilitator in Empowering Marginalized Women in Jakarta

Rossa Dwi Septyana¹, Indri Ajeng Setyoningrum²

Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2}

*E-mail: septyanarossa24@students.unnes.ac.id

Abstract

Marginalized women in urban areas face vulnerability due to social, economic, and gender inequalities that limit access to education, employment, social protection, and basic rights. This condition demands a contextual and sustainable empowerment approach, one of which is thru community-based non-formal education. This research aims to describe the role of facilitators from the KAPAL Perempuan Institute in empowering marginalized urban women thru the Sekolah Perempuan program in Jakarta. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation studies of facilitators, female school members, and institutional staff. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The research results show that facilitators play a strategic role in every stage of empowerment, namely the awareness stage thru the development of critical awareness of life experiences and gender inequality, the capacity-building stage thru gender-just education and strengthening local context-based leadership, and the empowerment stage thru cadre training, administrative mentoring, and women's rights advocacy. The role of the facilitator is not only technical but also transformative, serving as a bridge between women's experiences and critical knowledge. This research shows the role of facilitators in empowering urban marginalized women to the stage of empowerment; the facilitators successfully transformed their members into cadres for other vulnerable women.

Keywords: Women's Empowerment, Role of Facilitator, Non-formal Education, Marginalized Women, Women's School



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat miskin perkotaan, menjadi tantangan yang rumit termasuk keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan. Kelompok rentan yang tinggal di perkotaan acapkali terpinggirkan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan terhadap peluang kerja dan pendapatan. Kondisi ini didukung oleh urbanisasi yang begitu cepat, hal ini meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan fasilitas sehingga meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perkotaan. Intervensi kebijakan yang terpadu diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan akses sumber daya bagi masyarakat miskin di perkotaan (Haq et al., 2025). Kelompok rentan perkotaan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan sosial ekonomi yang signifikan dan keterbatasan akses. Kelompok ini tidak hanya terdiri dari masyarakat miskin, mereka juga mencakup perempuan, anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan orang

dengan HIV/AIDS (ODHA). Di lingkungan perkotaan yang dinamis dan kompleks, kelompok ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi hak dasar dan perlindungan sosial (Limbong et al., 2020).

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan, dalam hal ini BPS mencatat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2024, bahwa penduduk rentang umur 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin dan status yang tidak memiliki ijazah di perkotaan bagi perempuan sebesar 9,51 dan di pedesaan 18,97 dibanding laki-laki di perkotaan sebesar 6,30 dan di pedesaan 14,13. Data ini menunjukkan baik di kota maupun di desa perempuan rentang umur 15 tahun ke atas lebih banyak yang tidak memiliki ijazah dibanding laki-laki. Disamping itu, tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jumlah penduduk rentang usia 15 tahun ke atas bagi perempuan sebesar 55,41 dan laki-laki 84,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul sekitar satu setengah kali lipat dibanding perempuan dalam hal partisipasi angkatan kerja. Faktanya jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai juga lebih tinggi laki-laki sekitar 39,70 dibanding perempuan hanya 33,66 persen. Terkait upah yang dibayarkan dalam sebulan laki-laki lebih tinggi sekitar 3,30 dibanding perempuan hanya memperoleh 2,57 juta (rupiah). Kondisi ini juga meningkatkan angka pengangguran yang dialami oleh perempuan yaitu lebih tinggi antara angkatan kerja dengan lulusan perguruan tinggi sebesar 18,66 dibanding laki-laki hanya 8,16 persen disimpulkan dua kali lipat dari laki-laki (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Penelitian sebelumnya juga menyoroti kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan karena dampak ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang masih terjadi dan kondisi ini sangat memprihatinkan (Hulahi et al., 2022; Larashati, 2022).

Setiap individu baik perempuan dan laki-laki memiliki potensi kesempatan yang sama dalam memperoleh aspek kehidupan baik melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan politik. Salah satu indikator aspek kehidupan yaitu pendidikan. Ketika aspek tersebut terpenuhi maka seluruh potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan maksimal tanpa adanya diskriminasi (Hennebry et al., 2016; OECD, 2017). Pendidikan merupakan sebuah upaya yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk mengembangkan potensi individu dalam membentuk karakter yang baik di masyarakat (Ratnaningrum, 2022). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 3 UU nomor 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional, pendidikan nonformal berfungsi sebagai jalur pendidikan di luar sistem formal. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pendidikan formal dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan individu. Konteks pendidikan nonformal lebih adaptif dalam mengintegrasikan nilai-nilai responsif gender, membongkar stereotip, dan juga mendorong refleksi kritis atas norma sosial yang membatasi. Secara yuridis, berbagai kebijakan nasional dan internasional menegaskan bahwa pendidikan nonformal sangat penting untuk mempercepat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Haryono & Mulyana, 2023; Kim, 2017; Mondal, 2022; A. Putra, 2023; Stromquist, 2015).

Salah satu bagian dari pendidikan nonformal adalah pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan aspek pembangunan berkelanjutan (SGDs) terutama aspek ke 4 yaitu pendidikan berkualitas dan ke 5 kesetaraan gender. Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan daya (*empowerment*) penguatan kepada masyarakat. Penelitian (Setyoningrum et al., 2023) menyoroti kebijakan kebebasan belajar melalui komunitas pada pemenuhan kebutuhan belajar sesuai minat individu dengan sumber belajar dari mana saja. Tujuannya untuk memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang-orang untuk membantu mereka menentukan masa depan mereka sendiri dan berkontribusi pada upaya yang mempengaruhi kehidupan kelompok mereka (Ife et al., 2008). Pemberdayaan masyarakat adalah inti dari proses tindakan sosial yang menyatakan beberapa tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007; Mas'adah, 2021). Tahapan pemberdayaan tidak hanya menyampaikan materi semata tetapi juga mendorong individu lain, membantu mereka, dan berhubungan dengan sumber daya eksternal agar mempengaruhi keberhasilan program (Raffi et al., 2025).

Model pemberdayaan akar rumput berbasis pendidikan sepanjang hayat salah satunya adalah Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Institut Kapal Perempuan. Organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan, para pesertanya adalah mereka penyintas kekerasan, perempuan miskin, dan kepala keluarga perempuan. Menurut aufa, selaku *resource center* Kapal Perempuan kehadiran sekolah perempuan membawa perubahan pada perempuan-perempuan yang tidak punya sumber penghidupan dan bergantung pada suami, dimana seringkali memunculkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Studi sebelumnya telah banyak menyoroti bahwa program pemberdayaan terutama perempuan mampu meningkatkan literasi, keterampilan hidup, dan kemandirian wanita. Disisi lain menunjukkan hambatan signifikan yang dihadapi oleh wanita (Marofah & Ma'ruf, 2022; Muhammad Ibrahim et al., 2025; Rana et al., 2024; Septianingrum et al., 2024). Akan tetapi, penelitian yang secara eksplisit membahas peran fasilitator dalam memberdayakan perempuan khususnya di daerah perkotaan masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran fasilitator dalam pemberdayaan perempuan marginal daerah perkotaan yang diinisiasi oleh Institut Kapal Perempuan melalui Sekolah Perempuan. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran fasilitator dalam melakukan tahapan pemberdayaan melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti metode penelitian ini mengumpulkan data-data deskriptif dari orang-orang baik secara lisan dan tulisan melalui perilaku yang diamati. Metode penelitian mengumpulkan dan menganalisis data dari situasi dimana penulis mengungkapkan keadaan sosial sebenarnya (Sugiyono, 2021). Penelitian dilaksanakan di Institut Kapal Perempuan yang terletak di Jalan KH. Guru Amin, Kalibata Timur Raya, No.5 RT/03, RW/10, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif yang mana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan pemberdayaan, penelitian berlangsung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari (1) data primer, yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian oleh individu yang melakukan penelitian atau seseorang yang berkaitan melalui wawancara terhadap subjek penelitian yaitu seorang wakil direktur internal, seorang wakil direktur program, seorang fasilitator kapal perempuan, perwakilan empat anggota sekolah perempuan, serta seorang staf lembaga. (2) Data sekunder, diperoleh melalui kajian-kajian literatur dari penelitian terdahulu, data-data, dokumen dari lembaga terkait, buku profil, grade sekolah perempuan, website dan media sosial lembaga.

Penelitian ini menggunakan analisis data dan Model Miles and Huberman, ada beberapa macam tahap analisis data yaitu: (1) pengumpulan data secara sistematis dengan melakukan observasi di kantor kapal perempuan dan mendatangi salah satu rumah anggota sekolah perempuan, melihat kondisi dan lapangan tempat mereka belajar. Selanjutnya bertemu dan wawancara dengan fasilitator, staf lembaga, dan perwakilan anggota sekolah perempuan untuk memperoleh informasi yang sesuai berdasarkan pengalaman mereka; (2) reduksi data, dengan memaparkan, memilah informasi berdasarkan pesan yang diperoleh dan memfokuskan pada bagian-bagian penting agar mudah dipahami; (3) penyajian data, menggambarkan hasil penelitian secara sederhana dalam bentuk kalimat, kata-kata, dan narasi yang lebih komprehensif; (4) simpulan data. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan pengecekan data melalui sumber dan teknik penelitian. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dengan hasil wawancara dari beberapa sumber informan yang berbeda termasuk staf lembaga, fasilitator, dan anggota sekolah perempuan. Lalu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran fasilitator KAPAL Perempuan dalam tahap pemberdayaan

Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan adalah organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan yang berdiri sejak tahun 2000. Organisasi ini dibentuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap hak-hak perempuan termasuk seksualitas, kesehatan reproduksi, dan praktik diskriminasi terhadap kelompok marginal. Programnya dikenal sebagai Sekolah Perempuan yang saat ini telah menyebar dan diadopsi di berbagai wilayah. Sekolah Perempuan merupakan wadah pembelajaran dalam mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan di komunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, dan kepulauan terpencil. Tujuan utama Sekolah Perempuan yaitu mengembangkan kepemimpinan perempuan agar menjadi perilaku perubahan sosial agar terbebas dari jerat kemiskinan. Pengalaman perempuan menjadi sumber penting dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan.

a. Peran fasilitator dalam tahap penyadaran

Fasilitator Kapal Perempuan menjalankan perannya melalui pendekatan live ini selama kurang lebih tiga hingga enam bulan. Dalam jangka waktu tersebut fasilitator melakukan asesmen partisipatif dengan mengamati aktivitas keseharian perempuan mulai dari rutinitas di pagi hari, aktivitas domestik, hingga memperoleh waktu luang yang umumnya tersedia pada siang hari. Pendekatan ini memungkinkan fasilitator untuk membangun kedekatan secara emosional dan memahami dinamika kehidupan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh mbak Ema, selaku fasilitator yang mendampingi saat itu “Kami melakukan asesmen ya, kita enggak langsung apa namanya belajar atau apa tapi kayak observasi. Melihat-lihat dulu bagaimana ini itu, seperti apa lingkungannya. Dari jam setengah 6 pagi saya sudah di komunitas, saya ngamatin. Apa sih yang dilakukan ibu-ibu di pagi hari dan bapaknya ngapain, jadi saya masuk ke kampung-kampung itu saya amatin. Ternyata disini itu yang paling kena dampaknya ya beban ganda itu adalah perempuan”. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas perempuan masih menghadapi beban ganda pekerjaan rumah tangga, namun belum sepenuhnya menyadari bahwa pekerjaan domestik tersebut memiliki nilai dan berkaitan dengan hak mereka. Proses penyadaran dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui metode penggambaran sketsa wajah dan penelusuran silsilah keluarga untuk mengidentifikasi pengalaman kekerasan lintas generasi yang pernah dialami oleh perempuan. Beliau menerangkan “Apa sih permasalahan perempuan? jadi anggota sekolah perempuan menggambarkan sketsa wajah. Jadi turun-temurun, apakah dia misalkan dari ibunya, kakeknya, apakah ada mengalami kekerasan seperti poligami, KDRT di dalamnya, seperti itu”. Mengutip wawancara mbak Ema selanjutnya “Kalau seandainya dia tidak bisa baca, kita ajarin baca dulu yang penting dia bisa tanda tangan, soalnya ada juga yang buta huruf”. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat perempuan yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis secara memadai, termasuk dalam melakukan tanda tangan. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi aspek krusial tidak hanya dipahami sebagai kemampuan literasi, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran kritis perempuan terhadap hak-hak mereka. Pada kondisi ini didukung oleh penelitian (B. D. Putra & Yulindrasari, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan fasilitator bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan dan empati terhadap peserta, terutama dalam mengubah kesadaran pasif menjadi kesadaran kritis terhadap ketimpangan gender.

b. Peran fasilitator dalam tahap pengkapsitasan

Fasilitator melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak perempuan bergabung di Sekolah Perempuan sebagai ruang belajar yang aman dan inklusif. Melalui pendidikan adil gender (PAG) berfokus pada pemahaman relasi gender yang setara, baik dalam pembagian peran di rumah tangga maupun dalam akses terhadap bantuan sosial dan layanan publik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di berbagai ruang yang dekat dengan kehidupan perempuan, seperti rumah warga, lapangan, atau pinggir sungai. Disamping itu fasilitator juga berperan sebagai motivator,

mengaitkan penguatan kepemimpinan dengan isu-isu kontekstual yang terjadi di lingkungan masyarakat tinggal, yaitu kerentanan terhadap bencana kebakaran dan banjir di wilayah padat penduduk. Perempuan dibekali pengetahuan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, didorong untuk berani menyuarakan kebutuhan komunitas kepada pemerintah khususnya terkait perlindungan sosial pascabencana. Seperti yang dijelaskan oleh mbak Ema, “Ibu-ibu sudah percaya diri, bisa mendampingi kasus-kasus tersebut dan memperjuangkan haknya. Dari mulai modul PAG mereka mampu belajar daya kritis dan membangun kepercayaan diri, diberi pengetahuan kapasitas, harus clear dengan permasalahannya”. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran perempuan dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya terlepas dari keterbatasan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Sejalan dengan penelitian (Anjaini et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengkapasitasan efektif ketika fasilitator mampu mengkolaborasikan pelatihan praktis dengan pendidikan reflektif berbasis pengalaman hidup peserta. Meskipun demikian, mengutip wawancara mba Ulfa, selaku wakil direktur program KAPAL “Diantara pekerjaan-pekerjaan domestik, dia kadang-kadang kalau misalnya satu pertemuan yang tidak ada benefitnya dalam arti uang dia tidak akan datang”. Penelitian ini menemukan keterbatasan waktu yang dimiliki pesertanya karena kesibukan dalam mencari pendapatan sehari-hari sehingga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan.

c. Peran fasilitator dalam tahap pendayaan

Puncak dari proses pemberdayaan adalah tahap pendayaan, dimana anggota sekolah perempuan diberi kesempatan dan wewenang untuk memimpin kelompok mereka setelah mereka dikatakan mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fasilitator membantu para anggotanya yang telah berdaya melalui (1) program training of trainers sebagai leaders bagi kelompoknya, dengan kata lain fasilitator berhasil mengkaderisasi anggota sekolah perempuan sebagai kelompok yang mandiri dan berdaya. Dalam konteks program, sekolah perempuan memiliki istilah grade yang digunakan sebagai raport. Grade dikembangkan sebagai upaya memperkuat keorganisasian sekolah perempuan sebagai dasar gerakan perempuan setelah para anggotanya selesai menyelesaikan proses kegiatan belajar yang telah diikuti. Hal ini dilihat sebagai bentuk penilaian dalam tingkatan perkembangan kapasitas melalui aspek perspektif, komitmen, pengetahuan, keahlian, serta kemampuan berorganisasi. Kondisi ini didukung (Ilham, 2020; Kasim & Sembadra, 2025) yang menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas perempuan melalui empat unsur perubahan yaitu kesadaran, komitmen, politik, dan budaya. Ini sejalan dengan penggunaan nilai sebagai tolak ukur menunjukkan tingkat kemampuan dan kesadaran setelah proses belajar. Selanjutnya, (2) pos pelayanan pengaduan sekolah perempuan, kegiatan ini memberikan pendampingan administratif oleh fasilitator bagi perempuan yang tidak memiliki identitas hukum seperti KTP dan kartu keluarga. Pendampingan ini berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, terutama dalam mengakses program bantuan sosial pemerintah. Mengutip wawancara mba Ema “Suara perempuan paling bawah itu tidak langsung didengar oleh pemerintah. Kalau untuk sekarang setelah bergabung dengan sekolah perempuan ya dari perempuan akar rumput pun sendiri itu bisa (mandiri) ya”. Hasil penelitian menunjukkan dampak dari pendampingan tersebut meningkatkan kemampuan perempuan dalam memenuhi persyaratan administratif sebagai penerima manfaat program pemerintah. Peran pendampingan tidak hanya sebagai fasilitator, perwakilan, edukator, tetapi juga teknis menghubungkan penerima manfaat dengan pemerintah, termasuk hal yang berkaitan dengan administrasi bantuan, pemutakhiran data, serta catatan pelaporan bulanan (Anggraeni et al., 2022; Karina & Yusuf, 2025). Disamping itu, pos pelayanan pengaduan SP menerima berbagai laporan kasus di wilayah masing-masing untuk melakukan advokasi kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan pendampingan. Hal ini sejalan sebagai agen perubahan terhadap edukasi hak, penjangkaran kasus, pendampingan program/psikologis, serta sarana pelayanan bagi kelompok rentan (Anggraeni et al., 2022).

Keberhasilan peran fasilitator Kapal Perempuan melalui sekolah perempuan tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh fasilitator yaitu sarjana tingkat strata satu (S1). Mereka mampu menyampaikan informasi dengan cara yang membaaur dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta SP. Metode yang digunakan dalam proses pemberdayaan sangat menyenangkan dan partisipatif, fasilitator menggunakan bahasa sehari-hari yang dekat dengan pengalaman perempuan dan membangun relasi belajar yang setara. Demikian dengan (Sonjaya et al., 2025) menyoroti bahwa fasilitator berperan sebagai social catalyst yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku kolektif pada kelompok marginal, mereka mendorong partisipasi aktif tanpa menghilangkan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan konteks "lifelong learning" yang memperkuat sumber daya manusia dan kepemimpinan perempuan melalui proses belajar berjenjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, program sekolah perempuan dapat berfungsi sebagai dasar gerakan sosial perempuan (Arista et al., 2024; Noventi, 2021).

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh fasilitator KAPAL Perempuan melalui sekolah perempuan Jakarta menemui beberapa kendala. Kendala atau faktor penghambat dalam penelitian ini dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para anggota SP yang bekerja tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menentukan waktu yang tepat disepakati untuk mengadakan pertemuan pukul satu atau dua siang setiap minggunya. Selain itu di antara pekerjaan-pekerjaan domestik yang terkadang satu pertemuan dirasa tidak ada benefit dalam arti uang ada peserta yang tidak datang. Sehingga pentingnya mengintegrasikan dengan berbagai life skill anggota dalam penyuluhan serta membuat peserta tertarik dan bermanfaat untuk mencari penghasilan.

Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah masuknya KAPAL di lingkungan warga, awalnya mengalami penolakan karena dianggap sebagai organisasi yang sesat dan durhaka terhadap suami. Disamping itu tuduhan adanya kristenisasi yang disangka karena metode yang dilakukan oleh fasilitator salah satunya dengan bernyanyi. Setelah dijelaskan dengan baik-baik, berproses kemudian KAPAL bisa diterima dengan baik oleh warga.

Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah terkait dengan keterbukaan pemerintah lokal tingkat RT/RW dalam memberikan pendataan seperti KTP/KK, sehingga apabila ada anggota yang belum memiliki identitas hukum dapat dibantu proses pemenuhan hak-hak mereka. Faktor pendukung dalam tahap pemberdayaan tidak terlepas dari tingkat partisipasi anggota sekolah perempuan. Anggota sekolah perempuan selalu aktif dan merasa nyaman dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan warga maupun aktif dalam kegiatan sosial di luar.

Simpulan

Penelitian ini menggambarkan peran strategis fasilitator Institut KAPAL Perempuan dalam pemberdayaan perempuan marginal perkotaan melalui Sekolah Perempuan di Jakarta. Fasilitator tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sebagai penghubung pengalaman hidup perempuan dengan pengetahuan kritis, sehingga tercapainya pemberdayaan sangat bergantung pada pendekatan yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual dalam pendidikan nonformal. Hal ini menegaskan bahwa faktor pendukung seperti keterbukaan pemerintah lokal setempat dan partisipasi aktif peserta mampu mengatasi hambatan internal yaitu keterbatasan waktu dan eksternal berupa penolakan awal komunitas. Pendekatan ini membuka wawasan baru bahwa pemberdayaan berkelanjutan memerlukan integrasi *life skills* untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi peserta. Temuan ini menjadi dasar replikasi model sekolah perempuan di regional lain, dengan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga perempuan marginal. Penelitian

selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan mixed-methods untuk mengukur perubahan kuantitatif seperti peningkatan akses bantuan sosial.

Daftar Rujukan

- Anggraeni, L. D., Widowati, L. P., Astriani, Y., Pratiwi, A. I., Suhaid, D. N., Novita, R. V. T., Acihayati, J. P., Prabawati, D., & Astrid, M. (2022). *WUJUD KEPEDULIAN DAN CARING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI MELALUI POS SAPA*. 5(9), 3002–3016. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.6754>
- Anjaini, J., Permatasari, M. N., Irawan, H., Kurniawati, A., Simangunsong, T., Hutabarat, P. U. B., Nurchamidah, N., Safingah, K., Mardika, H. P. K., & Setyaningsih, L. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi, Model, dan Inovasi untuk Transformasi Sosial)*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Arista, J., Adhiansyah, H. K., Farilla, H., Wahyuni, S., Bactiar, R. W., & Pamungkas, Z. S. (2024). Improving Skills and Empowering Women Community through Gayatri Womens ' School in Grenden Village , Jember , Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Reaserach*, 07(08), 6518–6523. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-84>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 2024 DI INDONESIA. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. (Vol. 15). <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/c9402c25d61aaa2ad5945d3a/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2024.html>
- Haq, I., Djuniarsah, M., Jalan, A., Tapa, K., & Barat, J. (2025). *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pendidikan di Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024 Universitas Trisakti , Indonesia kekurangan materi , tetapi juga ketidakmampuan memenuhi standar hidup yang layak . minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup , seperti maka*. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3612>
- Haryono, S. D., & Mulyana, S. A. (2023). Position of Women's Education in Accomplishing Sustainable Development Goals. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(2), 113–125. <https://doi.org/10.22515/bg.v7i2.6038>
- Hennebry, J., Williams, K., & Roberts, M. (2016). *Women Working Worldwide: a Situational Analysis of Women Migrant Workers September 2016 Un Women* (Issue September).
- Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., & Husein, R. (2022). The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. *Journal of Governance*, 7(1), 214–221. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143>
- Ife, J., Tesoriero, F., Qudsy, S. Z., Manulang, S., Yakin, N., & Nursyahid, M. (2008). *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi)*. *Pustaka Belajar*.
- Ilham, M. (2020). *STRATEGI KOMUNIKASI SEKOLAH PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PEREMPUAN MISKIN DI WILAYAH KEPULAUAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN*. 2, 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jnm.v3i2.844>
- Karina, P., & Yusuf, A. (2025). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang The Role of Family Hope Program (PKH) Companions in Overcoming Poverty of Beneficiary Families (KPM)*. 5(1), 64–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729>
- Kasim, Y., & Sembadra, I. S. (2025). *Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat : Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan Women ' s Leadership Participation from the Margins to the Center : Case Study of Sekolah Perempuan in Enhancing Women ' s Role in Formulating Equitable Public Policy*. 29(3). <https://doi.org/10.34309/jp.v29i3.1182>
- Kim, E. M. (2017). Gender and the Sustainable Development Goals. *Global Social Policy*, 17(2), 239–244. <https://doi.org/10.1177/1468018117703444>
- Larashati. (2022). Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam SDGS. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55–61.
- Limbong, R. J., Farikhat, N., Hartanto, M. F. B., Yuli, I., Ayunda, Z. M., Nike, D., Ramadhan, A.,

- Novitasari, M. I., Fardhani, L. A., & Saputri, F. I. (2020). Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)*. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Marofah, S., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Publika*, 1475–1488. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1475-1488>
- Mas'adah, N. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pada Akses Sanitasi Berkelanjutan Community Empowerment in Access to Sustainable Sanitation. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(2), 151–167. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>
- Mondal, D. A. (2022). Gender equality and women's empowerment: The foundation stones of sustainability. *International Journal of Home Science*, 8(3), 76–79. <https://doi.org/10.22271/23957476.2022.v8.i3b.1353>
- Muhammad Ibrahim, Husain, R., Zubaidi, M., Marzuki, K., & Saepudin, A. (2025). Sekolah Perempuan Hebat Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan "Pengolahan Butternut Squash." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.53695/jas.v6i1.1194>
- Noventi, I. A. (2021). Empowerment of Marginalized Group through Rural Women ' s School. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(3), 384–389. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.8>
- Putra, A. (2023). Development of Learning Materials for Nonformal Educational Leadership with Gender-Responsive Values. *International Journal of Research and Review*, 10(11), 281–292. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20231133>
- Putra, B. D., & Yulindrasari, H. (2023). *Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan*. 18(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962%2Fj2716179X.v18i1.128>
- Raffi, Z., Faridzi, A., Fitriyah, N. L., Nihayah, A., & Zahra, A. A. (2025). Peran Fasilitator Dalam Program Pelatihan Membatik Guna Meningkatkan Sumber Penghasilan Masyarakat. 11(September), 598–605.
- Rana, M. Q., Lee, A., Rodrigues Bezerra, J. F., & Villas Boas, G. H. (2024). Empowerment and Sustainability: Investigating Barriers to Women's Transition from Higher Education to Empowerment in Brazil. *Societies*, 14(11), 1–19. <https://doi.org/10.3390/soc14110234>
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22–28. <https://doi.org/10.26740/etj.v2n2.p22-28>
- Septianingrum, G. A., Alvito, P., Fatiha, R., Mumtaz, C. A., Jannah, A. M., Duta, R. A., Istiqomah, N., Gondangrejo, K., Indonesia, P. C., Parenting, P. P., Paham, P., Bencana, M., & Perempuan, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Karangturi (SEANTURI) untuk Meningkatkan Kualitas Diri dan Keluarga di Karangturi , Karanganyar. 13(2), 183–195.
- Setyoningrum, I. A., Hasanah, V. R., & Sardin. (2023). *Freedom of Learning : Lesson Learned from SALAM Community*. 15(3), 3461–3470. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.3014>
- Sonjaya, Y., Noy, I. R., Sutisna, E., Ermawati, Y., & Khotimah, K. (2025). *Evaluasi Dampak Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. 4(2), 266–284.
- Stromquist, N. P. (2015). Women's Empowerment and Education: Linking knowledge to transformative action. *European Journal of Education*, 50(3), 307–324. <https://doi.org/10.1111/ejed.12137>
- Sugiyono, P. L. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). *Alfabeta Bandung, CV*.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut KAPAL Perempuan yang telah memberikan akses, kepercayaan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi yang mendalam juga disampaikan kepada fasilitator, anggota sekolah perempuan, serta staf lembaga yang telah bersedia berbagi pengalaman, pengetahuan, dan waktu dalam proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Ibu Indri Ajeng Setyoningrum, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Kepada penulis yang telah menyelesaikan artikel dengan penuh dedikasi dan kesabaran dalam menjalani prosesnya serta Seluruh kontribusi tersebut memiliki peran penting dalam memperkaya proses penelitian dan penyusunan artikel ini.